



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Drs. Agus Uji Hantara, Ak, ME

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang RBKUNWAS

 **bangga  
melayani  
bangsa**



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025

## VISI

### Terwujudnya Pemerintahan Berkelas Dunia

Pada akhir periode Grand Design, yaitu Tahun 2025 adalah diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan: tidak ada korupsi; APBN/APBD efektif efisien baik; semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; komunikasi dengan publik baik; hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan)



## Roadmap RB 2020 - 2024

### DYNAMIC GOVERNANCE

Birokrasi semakin efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.

03

## Roadmap RB 2010 - 2014

### RULE BASED BUREAUCRACY

Birokrasi cenderung kaku dan berorientasi pada aturan.

01

## Roadmap RB 2015 - 2019

### PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

Birokrasi berorientasi hasil, manajemen kinerja diterapkan, dan didukung SPBE.

02



# Arahan Presiden Joko Widodo Tentang **Reformasi Birokrasi**



**1.**

Birokrasi yang  
**Berdampak**,  
Dirasakan Langsung  
Masyarakat

**2.**

Reformasi Birokrasi  
**Bukan Tumpukan  
Kertas**

**3.**

Birokrasi **Lincah  
dan Cepat**



# **PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PANRB MENERJEMAHKAN ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO**



- ① Pemangkasan Proses Bisnis Layanan Kepegawaian, Berdampak pada Jutaan ASN**
- ② Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik pada 4 Kluster Prioritas**
- ③ Transformasi Profesionalisme ASN Berbasis Digital (Meliputi Penyederhanaan Birokrasi & Jabatan Fungsional) dan Penataan Tenaga Non-ASN (Honorar)**
- ④ Akselerasi Pembentukan Mal Pelayanan Publik/MPP & MPP Digital di Seluruh Indonesia**
- ⑤ Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- ⑥ Percepatan Penyusunan Kebijakan Kelembagaan, Tata Kelola, dan ASN Menuju IKN Nusantara & DOB Papua**
- ⑦ Transformasi Sistem Pendidikan ASN Mendukung Percepatan Reformasi Birokrasi Tematik**

# TARGET KINERJA DALAM RPJMN

## MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI YANG BERKUALITAS

Indikator : % IP yang memiliki indeks RB “Baik” (kategori B ke atas)

Target : K/L: 96% | Prov: 82% | Kab/Kota: 65%

### REALISASI

**K/L: 91,6% (2021)**

Tahun 2022: Masih dalam tahap panel  
(Trennya akan meningkat tahun 2022)

**Prov: 88.23%**

30 dari 34 Provinsi sudah berpredikat B ke atas dengan perincian: B: 24; BB: 2; A: 4

Perubahan predikat:

Naik ke B : 2

Naik ke A : 3

**Kab/Kota: 32.09%**

163 Kab/Kota sudah berpredikat B ke atas dengan perincian: B: 140; BB: 21; A: 2

Perubahan predikat:

Naik ke B : 24

Naik ke BB : 11

Naik ke A : 2

### SEBARAN NILAI RB MINIMAL “B” PADA PEMDA KAB/KOTA



#### INDONESIA

Jumlah total kota/kabupaten: **514**

Jumlah kota/kabupaten Jawa & Bali: **128**

Jumlah kota/kabupaten Luar Jawa & Bali: **386**

**163**  
100%

Jumlah kota/kabupaten dengan Predikat RB B & BB di seluruh Indonesia (2021 : 139 Pemda)

**98**  
60%

Jumlah kota/kabupaten dengan Predikat RB B & BB di Jawa & Bali (2021 : 90 Pemda)

**65**  
40%

Jumlah kota/kabupaten dengan Predikat RB B & BB di Luar Jawa & Bali (2021 : 49 Pemda)

**128**

**514**

**386**

Pada tahun 2022, terdapat kenaikan predikat RB minimal baik (“B”) pada 36 Pemerintah Daerah, **16 Pemda diantaranya berada di luar jawa**. Sehingga tren persebaran Pemda dengan RB Minimal baik, meningkat dari 136 Pemda (2021) menjadi 175 Pemda tahun 2022.

## BIROKRASI YANG SEDERHANA, LINCAH DAN CEPAT (AGILE)



**46.259** struktur organisasi pada 91 K/L telah disederhanakan dan sebanyak **44.870** Jabatan administrasi telah dialihkan ke Jabatan Fungsional



**45** Jabatan Fungsional baru (berdasarkan keahlian), **124** usulan JF baru, sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi



**37** LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada K/L yang sesuai



**91%** Kementerian telah memiliki tata kelola SPBE yang baik

## BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL



Sampai dengan tahun 2022, implementasi SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar **±121,9 Triliun**

## BIROKRASI DENGAN PELAYANAN PRIMA & BEBAS KKN



Terbentuk **2165** unit percontohan pelayanan prima & anti korupsi, termasuk pada sektor penegak hukum



Program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan **STRANAS PK**

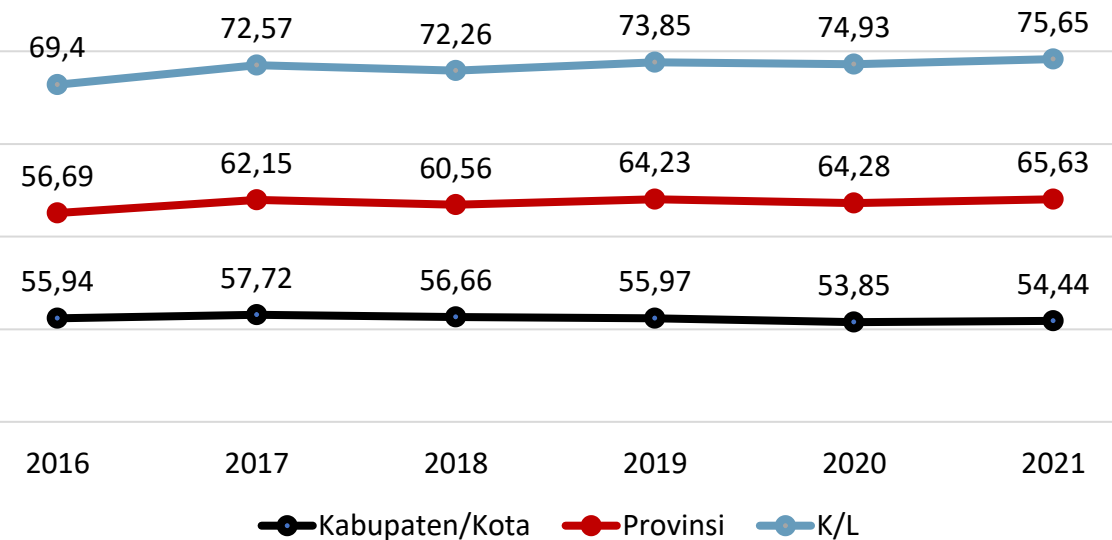


Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan **103 Mall Pelayanan Publik (MPP)** di daerah



# REFORMASI BIROKRASI: APA YANG SUDAH DIHASILKAN?

## Rata-rata nilai RB Tahun 2016-2021





# RB Mendukung Pembangunan Nasional

Peran pelaksanaan reformasi birokrasi perlu integrasi dengan upaya pemerintahan dalam menunjang kinerja pembangunan.

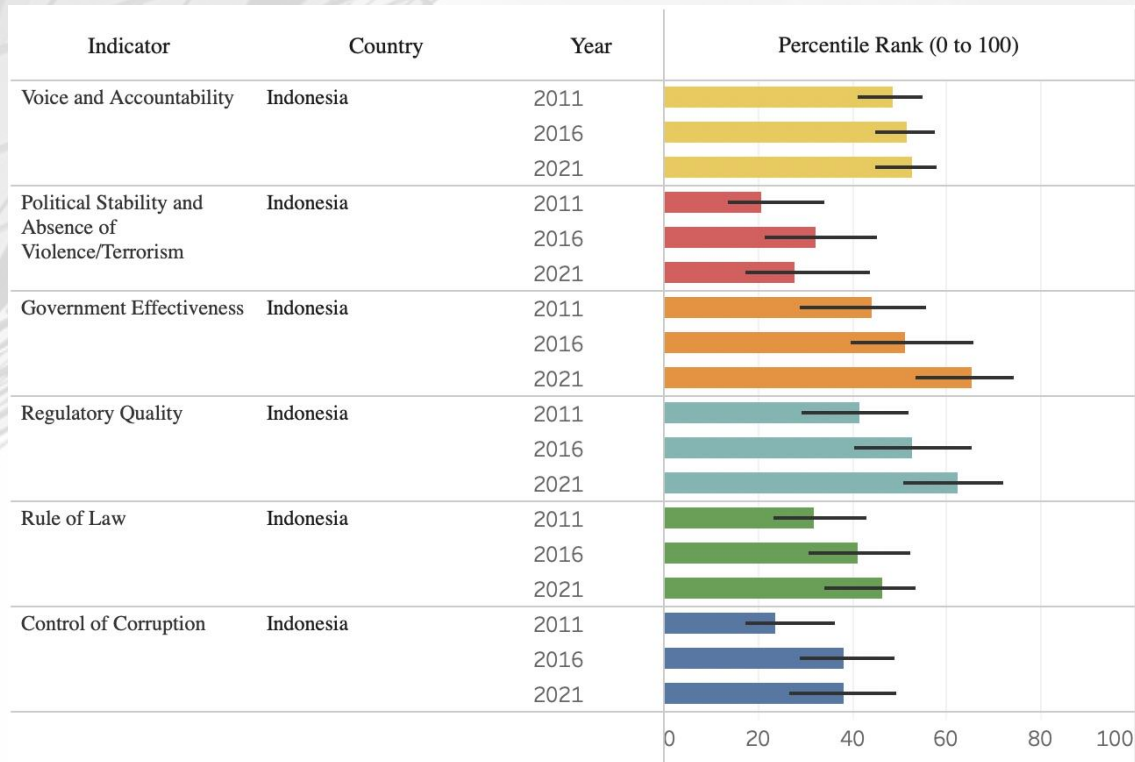


INDIKATOR PEMBANGUNAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022
Pertumbuhan Ekonomi	3,7%	5,2 – 5,8%	5,01%
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,49%	5,5–6,3%	5,86%
Tingkat Kemiskinan	9,71%	8,5–9,0%	9,57%
Rasio Gini	0,381	0,376–0,378	0,381
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	73,41 – 73,46	72,91

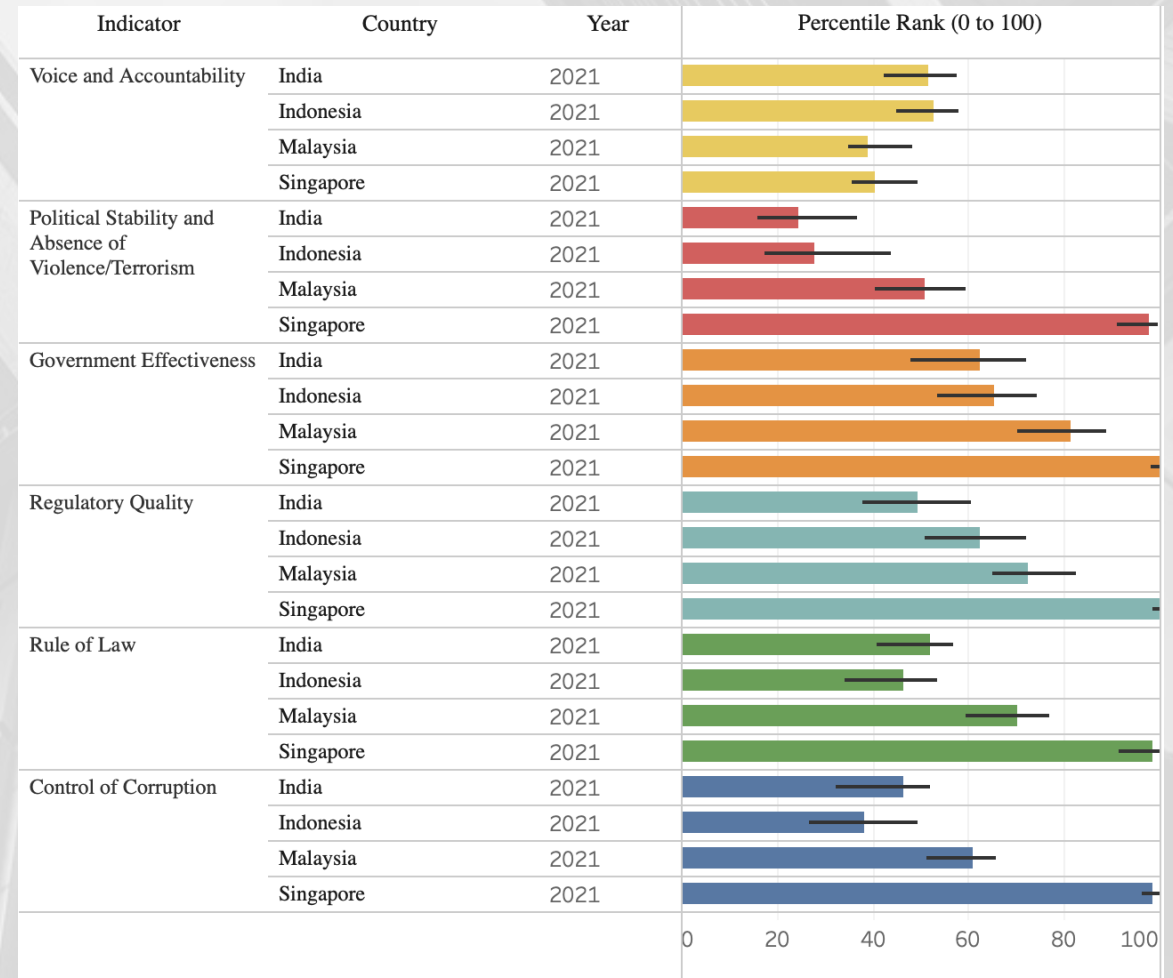
# Worldwide Governance Indicators

Peringkat persentil Indonesia pada:

- Sebagian besar indikator cenderung stagnan selama 3 tahun terakhir.
- Beberapa indikator mengalami peningkatan namun tidak signifikan.



Capaian Indonesia masih belum unggul jika dibandingkan dengan India, Malaysia, dan Singapore.



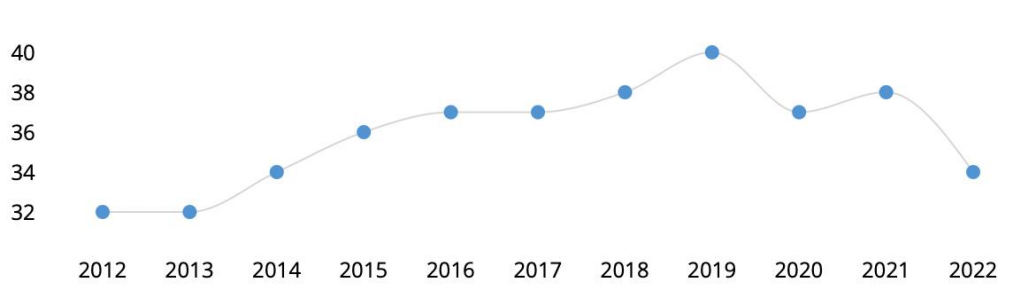


# Ease of Doing Business Rank

Country	Most Recent Year	Most Recent Value ^
Singapore	2019	2
Malaysia	2019	12
Thailand	2019	21
India	2019	62
Brunei Darussalam	2019	66
Vietnam	2019	70
Indonesia	2019	73

Tingkat Kemudahan Berbisnis Indonesia tahun 2019 berada pada peringkat ke-73 dari 190, masih belum unggul jika dibandingkan dengan India, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam.

# Corruption Perceptions Index



Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 berada pada peringkat ke-110 dari 180 dengan nilai 34 (turun 4 poin dan turun 14 peringkat dari tahun 2021).

# E-Government Development Index

E-Government Development Index	2022	2020	2018
Indonesia (Rank)	77	88	107
Indonesia (Value)	0.71600	0.66120	0.52580

Sejak tahun 2016, E-Government Development Index dan E-Participation Index Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan.



# KEKURANGAN & KRITIKAN ATAS CAPAIAN RB

01

## RB DIPANDANG BELUM BERDAMPAK

Capaian RB selama ini dipandang **belum memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian pembangunan.**

02

## TERTINGGAL JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN

Dilihat dari berbagai indikator tata Kelola Pemerintahan, baik secara nasional dan global, kualitas tatakelola pemerintahan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun **namun jika diperbandingkan dengan negara-negara lain terutama di ASEAN atau di ASIA, capaian tersebut masih jauh tertinggal.**

03

## MASIH MENGUKUR PROSES/ADMINISTRATIF

Penilaian kemajuan RB selama ini **dianggap lebih banyak mengukur proses bukan pada hasil/dampak**

04

## PELAKSANAANYA TIDAK KOLABORATIF

RB dipandang **hanya sebatas proyek** dan dikerjakan oleh Kementerian/unit tertentu.

## EKSTERNAL



1. Mendukung capaian target pembangunan nasional

**RB Telah berhasil memperbaiki tatakelola dalam berbagai aspek**  
Namun, upaya tersebut dianggap **belum memberikan manfaat nyata:**

2. Memberikan dampak kepada masyarakat.

## INTERNAL

## URGENSI PENAJAMAN ROADMAP RB 2020-2024





# PERLUNYA REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

## PROBLEM HULU (eksiting)

1. Kebijakan tata kelola pemerintahan pada level pusat (antar K/L) masih terkesan *silo (fragmented)* dan tumpang tindih, sehingga menghasilkan kebijakan yang inkonsisten bagi Pemda
2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya pengawasan dan sistem merit
3. Inefisiensi dan pemborosan penggunaan anggaran
4. Budaya birokrasi: berAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik
5. Kualitas SDM ASN yang belum merata
6. Birokrasi belum adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Contoh: transformasi digital)
7. RB hanya bersifat proyek dan pemenuhan administrasi
8. Komitmen pimpinan daerah terhadap RB yang rendah. (Contoh: belum ada *reward and punishment*)

## PROBLEM HILIR (Perlu diperhatikan)

1. Pelayanan publik
  - a. Dasar (pendidikan, kesehatan, akses pada air bersih)
  - b. Administratif (KTP, KK, SIM, Akte)
  - c. Perijinan
  - d. Sosial (bantuan sosial)
2. *Stunting*
3. Kemiskinan
4. Lapangan kerja
5. Perizinan
6. Inflasi



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



## PARADIGMA TATANAN BARU BIROKRASI UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN YANG KOLABORATIF

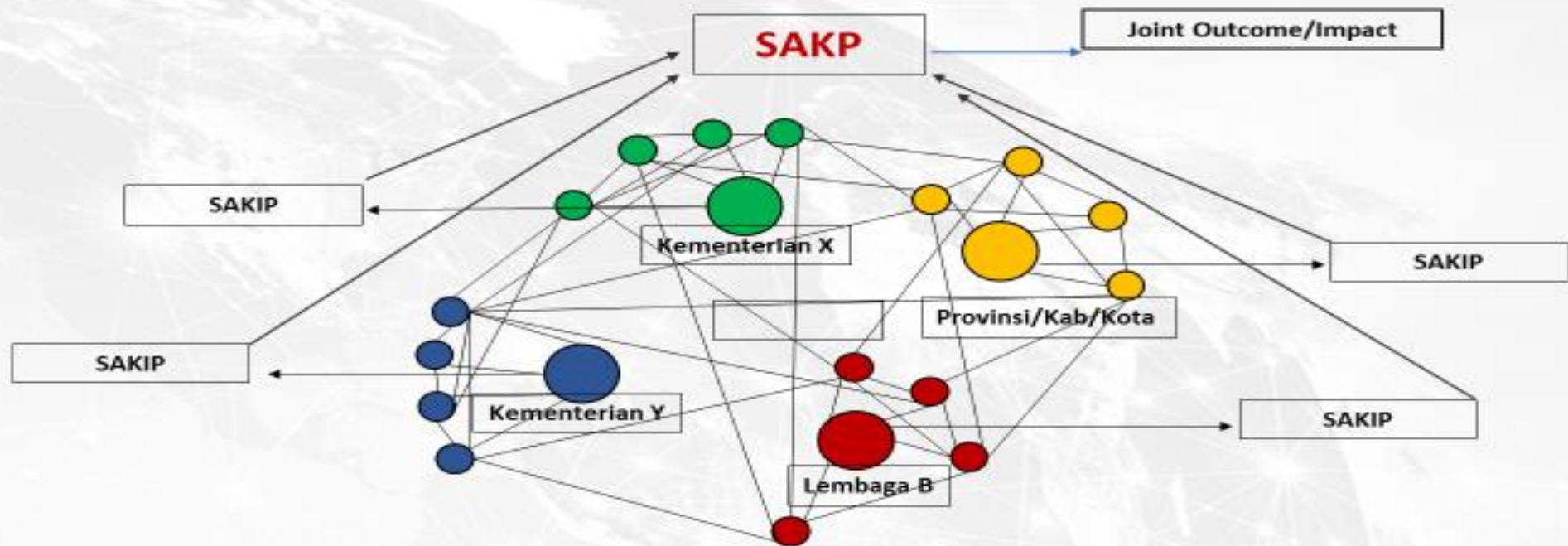




**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

## PEMERINTAHAN BERJEJARING DAN BERKOLABORASI



1. Indikator kinerja pemerintah menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas instansi pemerintah
2. Instansi-instansi bekerja secara gotong-royong (whole-of-government) dalam sebuah network governance

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

[menpan.go.id](http://menpan.go.id)





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

## MILESTONE ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

Roadmap RB 2010-2014

- Mewujudkan birokrasi yang bersih dari KKN, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang berkualitas (*fokus pada perubahan budaya birokrasi yang lebih baik*).

Roadmap RB 2015-2019

- Implementasi sasaran yang telah dilakukan sebelumnya dan mengupayakan pelaksanaan sasaran yang belum tercapai pada 5 (lima) tahun sebelumnya (*implementasi dan evaluasi agenda sebelumnya*)

Roadmap RB 2020-2025

- Peningkatan terus-menerus dan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia.
- Adanya RB **general** dan RB **tematik** sebagai usulan penajaman RB.

RPJMN 2020-2024

## MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL



TUJUAN RB 2020-2024

BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN BERDAYA SAING  
MENDORONG PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PELAYANAN PUBLIK

### INDIKATOR OUTCOME

- Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
- *Corruption Perception Index (CPI)*
- *E-Government Development Index (GDI)*
- *Government Effectiveness Index (GEI)*

### INDIKATOR IMPACT

Capaian Indikator Kinerja Pemerintah:

- Tingkat kemiskinan Nasional
- Tingkat realisasi investasi Nasional
- Tingkat Inflasi nasional
- Tingkat Penggunaan PDN

SASARAN RB 2020-2024

### RB GENERAL



Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif

- Indeks SPBE
- Capaian Akuntabilitas Kinerja
- Capaian Akuntabilitas Keuangan

Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional

- Employer Branding ASN
- Indeks BerAkhlaq
- Nilai Survei Penilaian Integritas
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

### RB TEMATIK

RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan **kemiskinan**, peningkatan **Investasi**, akselerasi **digitalisasi administrasi pemerintahan** (pengentasan **stunting**), **RB Tematik Prioritas Presiden**.



#### Indikator:

- Penurunan Tingkat Kemiskinan
- Peningkatan Realisasi Investasi
- Tingkat Pengendalian Stunting
- Laju inflasi
- Tingkat Penggunaan PDN



**panrb**  
KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# RB General

## SASARAN STRATEGIS 1 (*HARD ELEMENT*)

### TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINCAH, KOLABORATIF dan AKUNTABEL

#### 1.1 Kelembagaan dan Tata Laksana yang Lincah dan Efektif

- ☐ Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi
- ☐ Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN
- ☐ Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional
- ☐ Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral

#### 1.2 Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan yang Berkualitas

- ☐ Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- ☐ Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- ☐ Meningkatnya Kualitas Pengawasan

#### 1.3 Transformasi Digital pada Pelayanan Publik

- ☐ Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)

#### 1.4 Regulasi yang Harmonis dan Berbasis Bukti

- ☐ Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi

MESO  
• Merumuskan kebijakan  
• Koordinasi Pelaksanaan Eksternal  
• Monev Eksternal  
• Agregat K/L Minimal Baik

MIKRO  
• Koordinasi Pelaksanaan Internal  
• Monev Internal  
• Individual K/L Minimal Baik





**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# SASARAN STRATEGIS 2 (*SOFT ELEMENT*) BUDAYA BIROKRASI BERAKHLAK DENGAN ASN YANG PROFESIONAL

## 2.1 SDM ASN yang Profesional

- ☐ Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN
- ☐ Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN Yang Adil, Layak dan Berbasis Kinerja
- ☐ Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN Yang Efektif dan Efisien
- ☐ Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN
- ☐ Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien
- ☐ Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN
- ☐ Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional

## 2.2 Budaya Birokrasi Berakhlak

- ☐ Meningkatnya Budaya Pelayanan Prima

### MESO

- Merumuskan kebijakan
- Koordinasi Pelaksanaan Eksternal
- Monev Eksternal
- Aggregat K/L Minimal Baik

### MIKRO

- Koordinasi Pelaksanaan Internal
- Monev Internal
- Individual K/L Minimal Baik



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

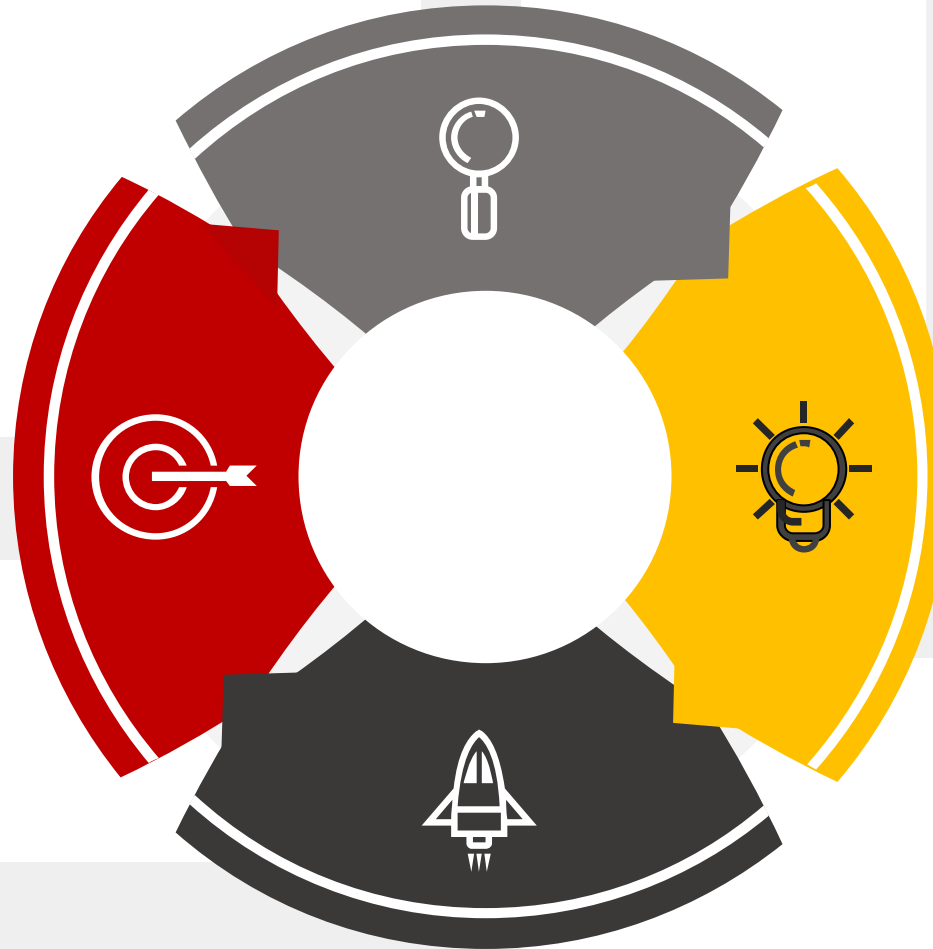
# RB Tematik

## WHY?

- ❑ **Mempercepat manfaat program pembangunan** agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
- ❑ Menunjukkan **kontribusi RB secara langsung** terhadap program prioritas pembangunan nasional.
- ❑ **Mempercepat penyelesaian permasalahan** utama di masyarakat.

## WHO?

- ❑ Seluruh K/L/P yang terkait dengan tema Prioritas yang ditetapkan



## WHAT?

- ❑ **KEMISKINAN:** anggaran kemiskinan besar tidak sebanding dengan hasil Penurunan Kemiskinan
- ❑ **INVESTASI:** mendorong percepatan kebijakan omnibuslaw dan peningkatan competitiveness indeks yang rendah, sehingga Investasi dapat menggerakkan perekonomian
- ❑ **DIGITALISASI ADMINSTRASI PEMERINTAHAN:** mempercepat terciptanya *agile goverment* dan daya saing digital di ASEAN & ASIA
- ❑ **RB TEMATIK PRIORITAS PRESIDEN:** merespon hal-hal yang mendesak (urgen) karena resiko persoalannya akan muncul segera dan memiliki dampaknya serius pada masyarakat. (Inflasi & Penggunaan PDN)

## HOW?

- ❑ **Debottlenecking** atau mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait tata kelola pada isu/program prioritas pemerintah



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

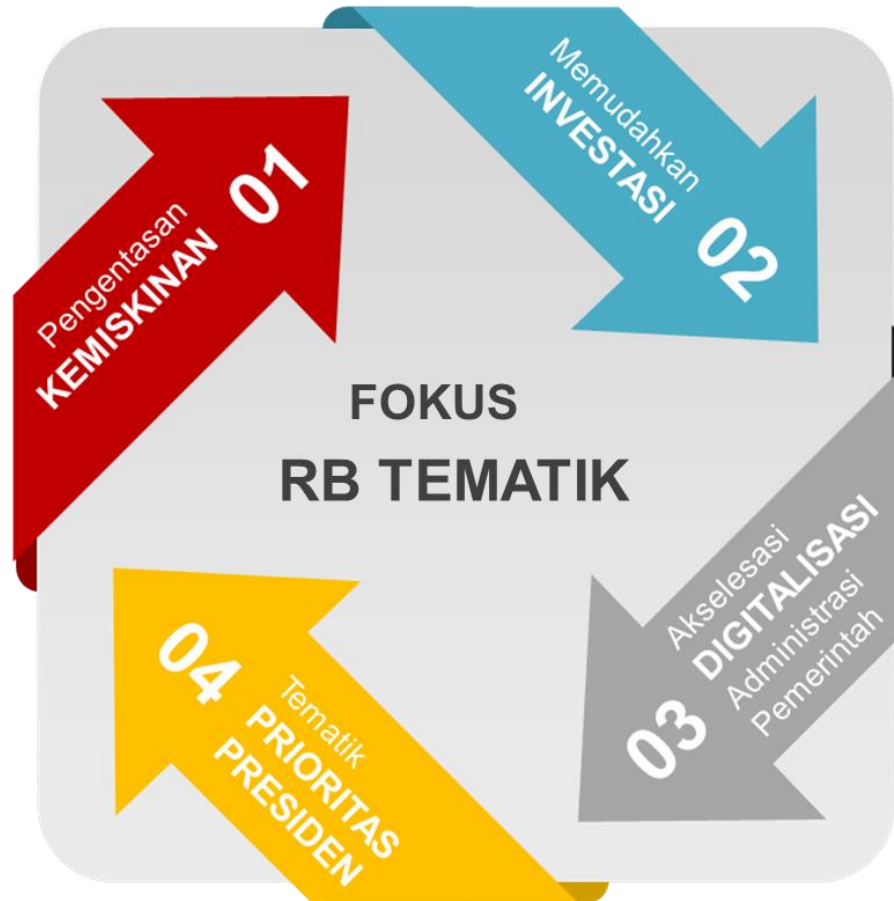
## RB Tematik Pengentasan Kemiskinan

Fokus Presiden untuk segera menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan target turunnya angka kemiskinan menjadi 7% dan daerah dengan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2024, maka **seluruh elemen birokrasi wajib berkolaborasi dan bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut.**

## RB TEMATIK PRIORITAS PRESIDEN

Tematik Prioritas Presiden. Isinya merespon hal-hal yang mendesak (urgen) karena resiko persoalannya akan muncul segera dan dampaknya juga serius pada masyarakat. Hal tersebut perlu dikawal oleh seluruh level pemerintah. (Inflasi & Penggunaan PDN)

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# RB TEMATIK

## RB Tematik Peningkatan Investasi

Presiden selalu menyampaikan bahwa investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Investasi yang meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. **RB perlu mengintervensi dengan menyederhanakan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih, termasuk meningkatkan budaya pelayanan prima bagi para investor.**

## RB TEMATIK DIGITALISASI Administrasi Pemerintahan

Presiden selalu berpesan agar "Pemerintah harus bergerak lebih lincah dan lebih cepat karena di era persaingan antar negara, yang cepat beradaptasi dengan teknologi akan mengalahkan yang gagap teknologi." Pemerintah harus bersiap menghadapi disrupsi teknologi dan iklim digital yang dicirikan dalam era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity).. **Pemerintah harus berbenah dan membangun birokrasi digital dengan fokus perbaikan pada digitalisasi struktur, culture maupun kompetensi.**

[menpan.go.id](https://menpan.go.id)



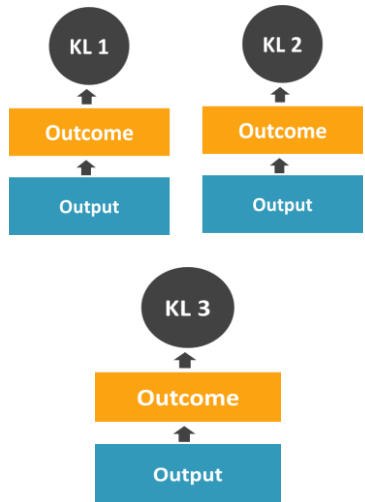


**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

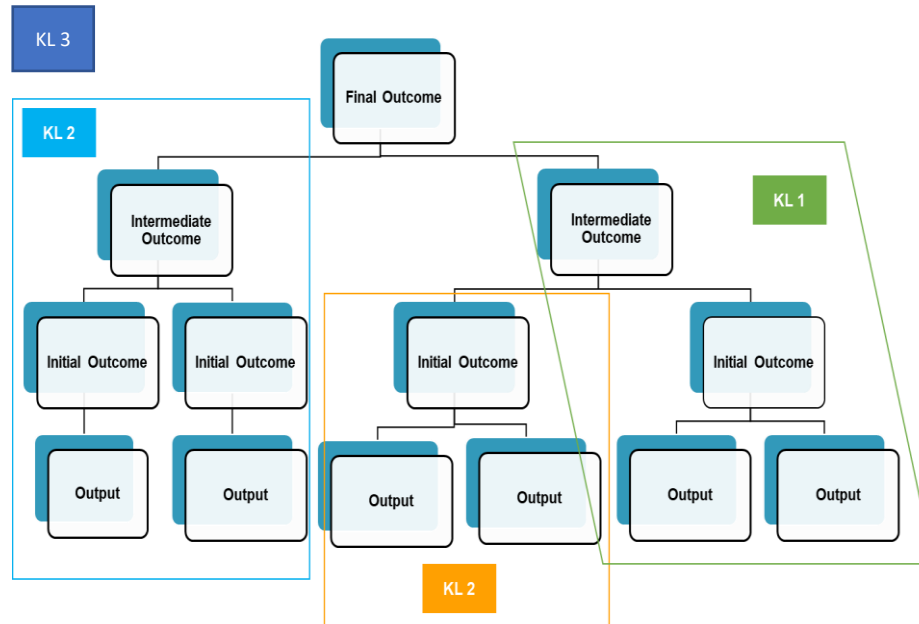
# KERANGKA LOGIS RB TEMATIK

## Kinerja Existing



*Output dan Outcome yang dihasilkan antar K/L masih silo*

## Kinerja yang Diinginkan`



- Penetapan kinerja didasarkan pada *Logical framework*
- Prinsip: *Sharing outcome*

## Identifikasi Masalah

**KINERJA YANG DIINGINKAN**



**KINERJA EKSISTING**

- Gap
- Akar Masalah

## Rencana Aksi

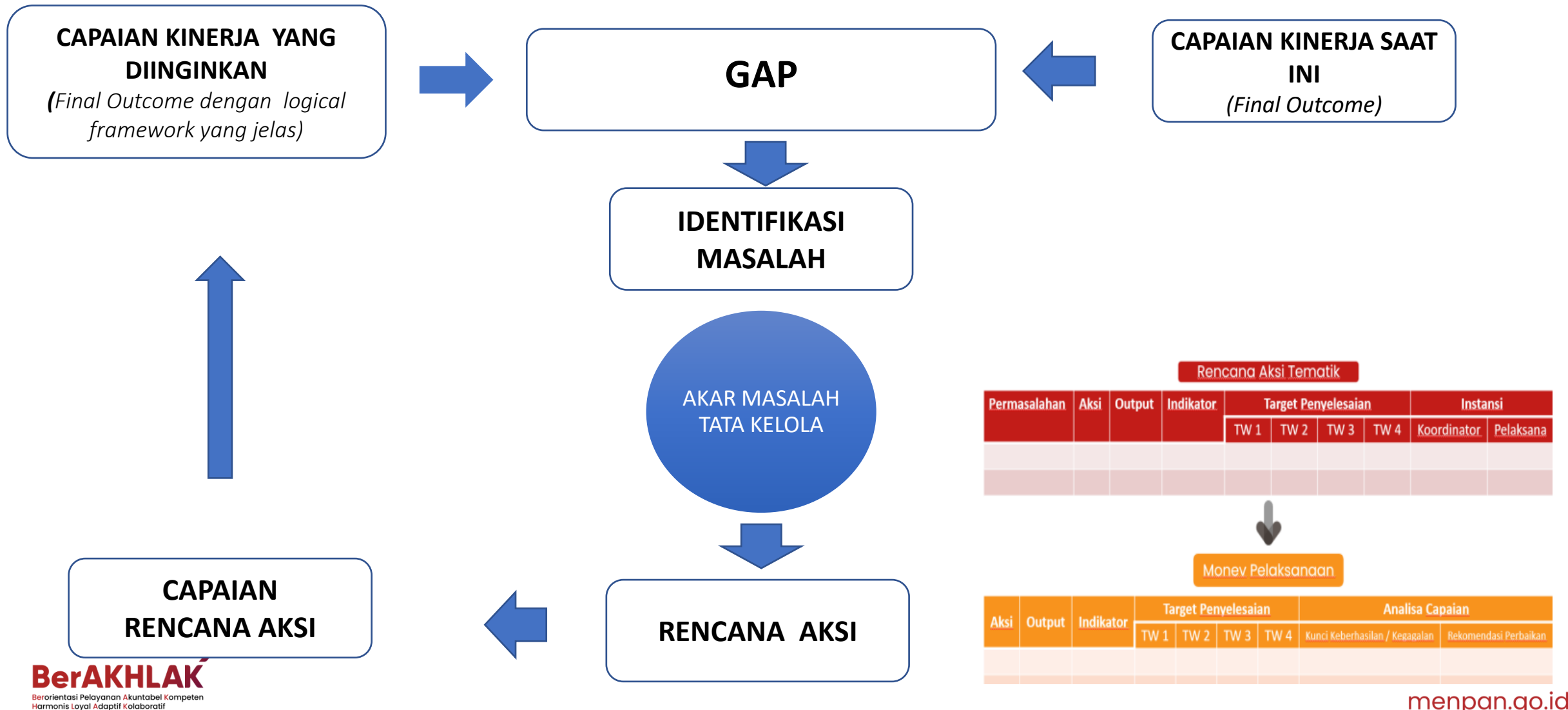
Penetapan kegiatan & tahapannya, beserta penanggung jawab

## Implementasi & Monev

Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi

**Debottlenecking Birokrasi: Akuntabilitas Kinerja**

# IDENTIFIKASI PERMASALAHAN & PERBAIKAN TATAKELOLA PROGRAM RB TEMATIK



# MEKANISME KERJA RB TEMATIK

## MEMBANGUN LOGICAL FRAMEWORK

Membangun *logical framework* yang dianggap paling ideal atau mampu mempercepat dampak atas tema yang dipilih.

## IDENTIFIKASI DEBOTTLENECKING

Mengidentifikasi hal-hal yang berdasarkan kondisi ideal (*logical framework*) belum dilakukan pada kondisi eksisting

## MELAKSANAKAN RENAKSI

Pelaksanaan rencana aksi bersama RB Tematik

## MENGUKUR HASIL/DAMPAK

Mengukur Outcomes/Impact dan menganalisis keterkaitannya dengan capaian rencana aksi

1

### PEMILIHAN TEMA

Memilih tema yang akan ditetapkan sebagai RB Tematik

2

### MEMBANDINGKAN DENGAN KONDISI EKSISTING

Membandingkan kesesuaian kondisi eksisting dengan kondisi ideal (*Logical framework*) yang telah ditetapkan sebelumnya.

3

4

5

### MENETAPKAN RENAKSI

Menetapkan rencana aksi untuk mengurai masalah/*bottleneck*

6

7

### MONEV RENASKI

Melaksanakan *Monitoring* dan evaluasi atas capaian dari setiap renaksi.

8



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# MILESTONE EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

**PermenPANRB  
Nomor 14  
Tahun 2014**

**2014-2019**

**Membangun Komitmen**

- Fokus pelaksanaan RB adalah membangun komitmen kepatuhan IP
- Fokus penilaian lebih menitikberatkan pada kepatuhan (pemenuhan dan administrasi)

**PermenPANRB  
Nomor 26  
Tahun 2020**

**2020-2024**

**Mendorong Percepatan  
Perubahan**

Pelaksanaan RB tidak hanya membangun komitmen, namun juga melihat perubahan yang dihasilkan pada tata Kelola pemerintahan

**PermenPANRB  
Nomor 9  
Tahun 2023**

**Mulai 2023**

**Mewujudkan Birokrasi  
Berdampak**

Pelaksanaan RB diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional





# GAMBARAN UMUM PROSES EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

## EVALUASI INTERNAL

### PROSES PEMBANGUNAN RB PADA INSTANSI PEMERINTAH

#### PERENCANAAN RB

Penyusunan  
*Road Map* RB

Penyusunan  
Rencana Aksi RB

Evaluasi Perencanaan  
(*Ex-Ante*)

01

#### PELAKSANAAN RB

Pelaksanaan  
Rencana Aksi RB

Evaluasi Pelaksanaan  
(*On-Going*)

02

## EVALUASI EKSTERNAL

Evaluasi Pasca  
Pelaksanaan  
(*Ex-Post*)

03

Penyampaian  
Laporan Hasil  
Evaluasi  
Eksternal

Saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan rencana aksi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan *road map* dan Rencana Aksi RB memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan K/L/D

Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam *road map* dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang dihadapi

Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil/dampak pelaksanaan RB, memberi saran dan rekomendasi, serta menyusun profil perkembangan pelaksanaan RB di Indonesia

Evaluator Internal

Evaluator Eksternal



**panrb**  
KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

## Dimensi RB General

### Capaian Strategi Pelaksanaan RB General

1. sub komponen kualitas rencana aksi, serta
2. sub komponen implementasi rencana aksi

### Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

1. 16 Indikator\* pada Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincih, dan Kolaboratif"
2. 2 Indikator\* pada Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional"



17 Kebijakan  
Percepatan RB

### Capaian Sasaran Strategis RB

Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincih, dan Kolaboratif"

1. Indeks SPBE;
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja; dan
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional"

1. SPI;
2. SKM;
3. Indeks BerAKHLAK; dan
4. Employer Branding\*\*

## Dimensi RB Tematik

Kementerian/Lembaga

### Capaian Rencana Aksi RB Tematik

### Capaian Indikator Dampak RB Tematik

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Peningkatan Realisasi Investasi
3. Tingkat Inflasi
4. Tingkat Penggunaan PDN
5. *Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerrintahan setiap tahunnya*

Pemerintah Daerah

### Strategi Pelaksanaan RB Tematik

### Capaian Indikator Dampak RB Tematik

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan
2. Peningkatan Realisasi Investasi
3. Tingkat Inflasi
4. Tingkat Penggunaan PDN
5. *Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerrintahan setiap tahunnya*

*Akan diatur secara detail dalam Keputusan Menteri*

\*) Terdapat penyesuaian nomenklatur indikator pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023

\*\*) Tidak dilakukan penilaian di tingkat mikro

# INDIKATOR PENILAIAN RB GENERAL\*

**Sasaran Strategis 1.**  
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

## Indikator Capaian Sasaran Strategis RB

1. Indeks SPBE
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja
3. Capaian Akuntabilitas Keuangan

## Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

- |  |  |
|--|--|
| 1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi               | 10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                     |
| 2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | 11. Indeks Pengelolaan Aset  |
| 3. Transformasi Layanan Digital                                | 12. Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan |
| 4. Tingkat Maturitas SPIP                                      | 13. Indeks Kualitas Kebijakan  |
| 5. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI                         | 14. Indeks Reformasi Hukum   |
| 6. Nilai SAKIP   | 15. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor                        |
| 7. Indeks Perencanaan Pembangunan                              | 16. Indeks Tata Kelola Pengadaan   |
| 8. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE              |  |
| 9. Tingkat Digitalisasi Arsip                                  |  |

**Sasaran Strategis 2.**  
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

## Indikator Capaian Sasaran Strategis RB

1. Survei Penilaian Integritas (SPI)
2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
3. Indeks BerAKHLAK
4. *Employer Branding*

## Indikator Capaian Implementasi Kebijakan Percepatan RB

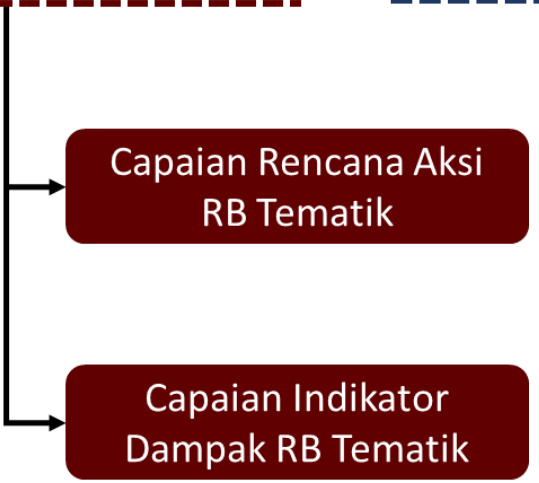
1. Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)
2. Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)

*\*)Akan diatur secara detail dalam Keputusan Menteri*

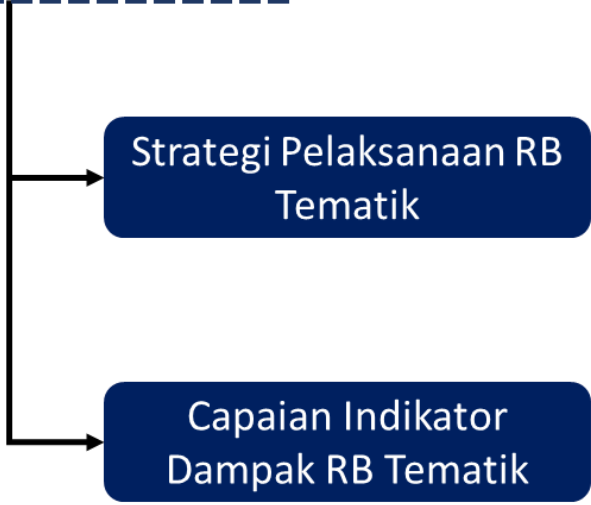
[menpan.go.id](http://menpan.go.id)

# INDIKATOR PENILAIAN RB TEMATIK\*

## Evaluasi RB Tematik Kementerian/Lembaga



## Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah



Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi		
Kategori	Nilai	Predikat
AA	>100	Sangat Memuaskan
A	>80-100	Memuaskan
A-		Memuaskan dengan Catatan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

*\*)Akan diatur secara detail dalam Keputusan Menteri*





## Evaluator Internal

- Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) dilaporkan kepada tim/unit pelaksana RB internal dengan tembusan kepada evaluator nasional melalui sistem informasi evaluasi RB Nasional.
- Hasil evaluasi *ex-ante* disampaikan paling lambat pada **akhir triwulan pertama** (minggu akhir bulan Maret),
- Hasil evaluasi on-going disampaikan paling lambat pada **minggu pertama triwulan berikutnya**.
- Memuat catatan hasil evaluasi, serta rekomendasi konkret untuk perbaikannya

## Evaluator Meso

- Evaluator meso melaporkan hasil penilaian yang merupakan komponen dari indeks RB dan menjadi tanggung jawabnya.
- Hasil penilaian evaluator meso disampaikan kepada evaluator nasional paling lambat **15 November setiap tahun** melalui sistem informasi evaluasi RB Nasional.

## Evaluator Nasional

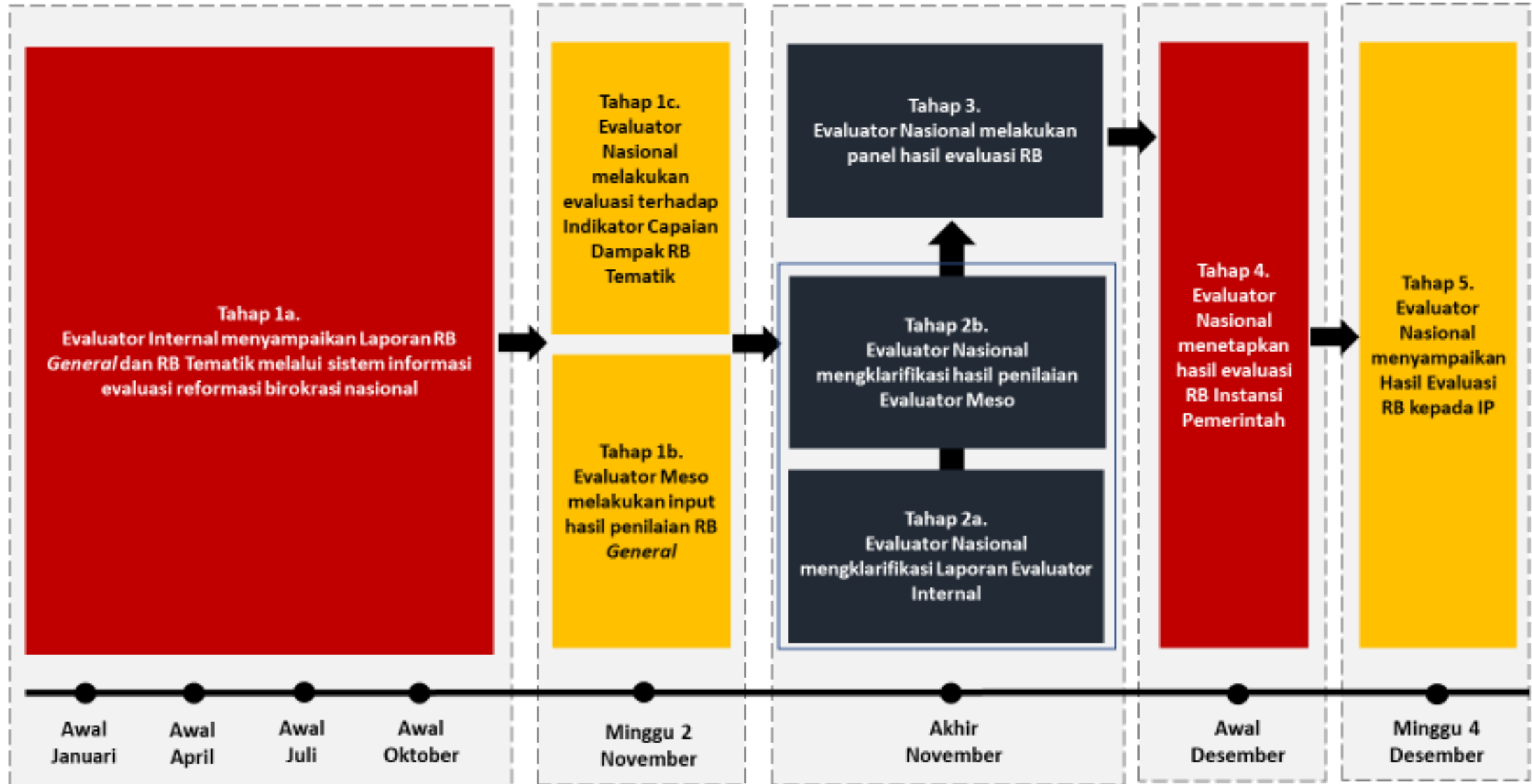
- Evaluator nasional melaporkan hasil evaluasi akhir pelaksanaan RB kepada K/L/D paling lambat **minggu keempat bulan Desember**.
- Memuat besaran indeks RB K/L/D serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB K/L/D



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Timeline Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi



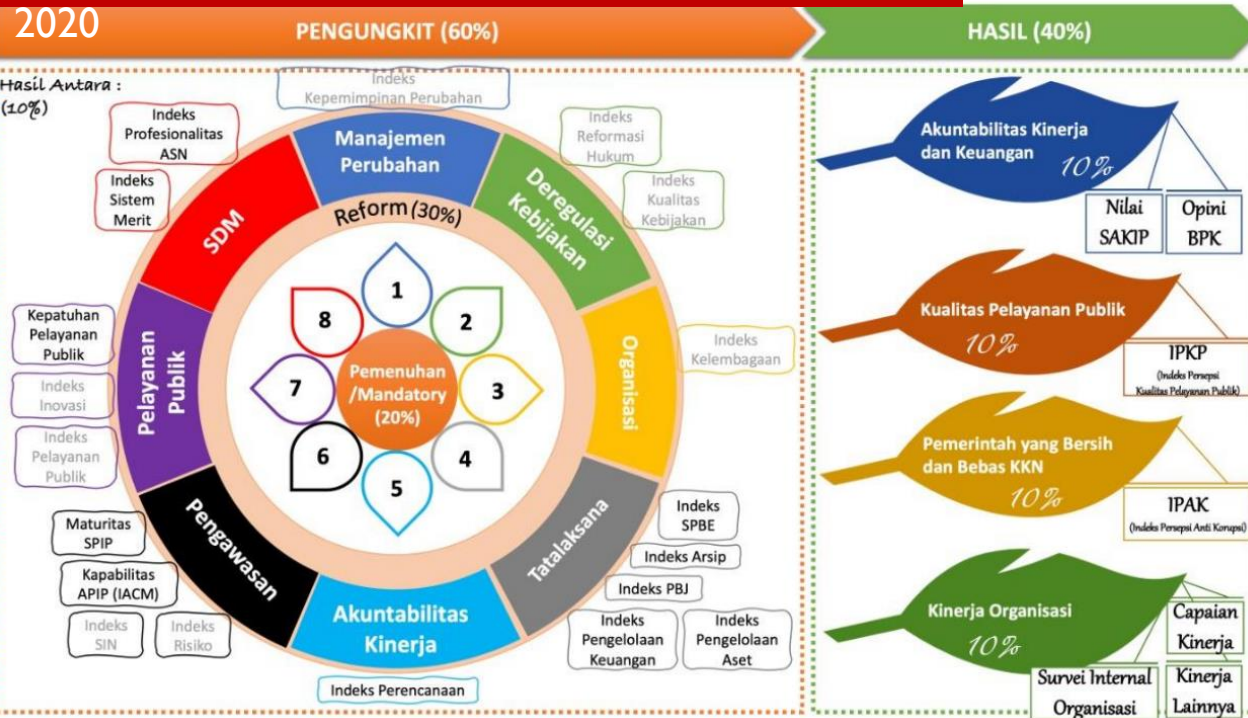


**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# Perbedaan yang lama dan yang baru

## KERANGKA EVALUASI PERMENPAN 26 TAHUN



### KOMPONEN PERTANYAAN

**157**

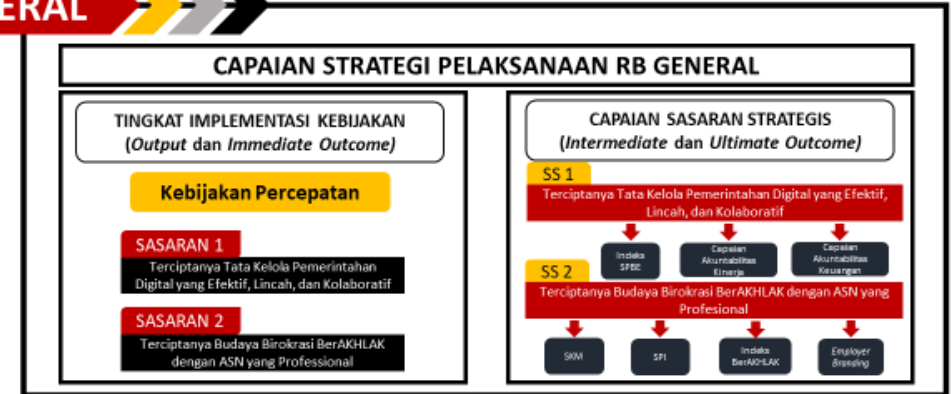
**PEMENUHAN**

**102**

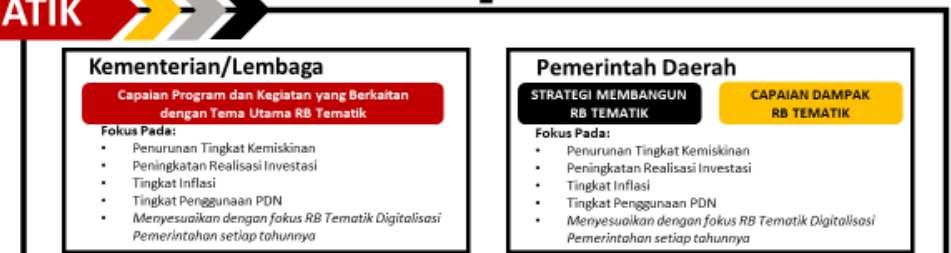
**REFORM**

## KERANGKA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BERDAMPAK

### RB GENERAL



### RB TEMATIK



### INDIKATOR PENILAIAN

**4**

**STRATEGI**

**25**

**HASIL**



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**#** bangga  
melayani  
bangsa

# TERIMA KASIH